KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RADIKALISME: 2.264 Akun Medsos Sebarkan Konten Terorisme
Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RADIKALISME

2.264 Akun Medsos Sebarkan Konten Terorisme

JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya 2.264 akun media sosial ditemukan menyebarkan konten berbau terorisme sepanjang 2024. Situasi ini perlu diwaspadai karena menunjukkan pola pendekatan teroris berubah menjadi lebih halus dengan target perempuan, anak, dan remaja, bukan lagi serangan fisik.

Temuan itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono dalam rapat kerja perdana Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya itu, BNPT melaporkan data aktivitas terorisme hasil pemantauan Subdirektorat Teknologi Intelijen BNPT terhadap media sosial sejak awal Januari hingga 29 Oktober 2024.

BNPT menemukan sedikitnya 10.519 konten berbau terorisme yang disebarkan di 571 akun Whatsapp, 1.013 akun Facebook, 185 akun Telegram, 129 akun X, 22 akun Youtube, 163 akun Instagram, 145 akun media daring, dan 36 akun Tiktok.

Sebagian besar konten berisi propaganda, seperti anti-NKRI, anti-Pancasila, intoleran, dan konten takfiri, yakni paham yang mengajarkan untuk menuduh atau menghukum seseorang sebagai kafir. Ada pula konten perekrutan dan pelatihan teroris, perencanaan dan pelaksanaan serangan teror, serta pendanaan dan penyediaan logistik.

Dalam paparannya, Eddy Hartono mengungkapkan, tren serangan teroris secara terbuka terus menurun sejak 2018. Bahkan, sepanjang 2023 hingga Oktober 2024, Indonesia nihil serangan teroris. Meski demikian, pola serangan *hard* atau fisik dari para teroris kini berubah menjadi pendekatan halus atau *soft*. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan paham kepada kaum rentan, yakni perempuan, anak, dan remaja.

> ***Tren serangan teroris secara terbuka terus menurun sejak 2018.***
> Eddy Hartono

"Di bawah permukaan, terjadi perubahan pola serangan dari *hard* menjadi *soft approach attack* dan peningkatan radikalisasi yang dilakukan secara *online* pada target perempuan, anak, dan remaja," tuturnya.

Merujuk pemetaan BNPT, sebanyak 70,2 persen remaja atau siswa SMA tergolong toleran, 22,4 persen merupakan remaja intoleran pasif, 5 persen intoleran aktif, dan 0,6 persen remaja yang berpotensi terpapar. Jumlah remaja intoleran aktif cenderung meningkat dari 2,4 persen pada 2016 menjadi 5 persen pada 2023. Hal serupa juga terjadi pada remaja yang masuk dalam kategori terpapar, dari 0,3 persen pada 2016 naik menjadi 0,6 persen pada 2023.

Untuk itu, lanjut Eddy, pemerintah wajib mencegah tindak pidana terorisme. BNPT mengedepankan langkah antisipasi yang dilandasi dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kehati-hatian. Pencegahan dilakukan lewat kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Sebagai pusat data analisis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT bakal membangun sarana dan prasarana untuk menunjang tugas. Ini di antaranya pusat pemantauan (*monitoring center*), pusat komando (*command center*), dan pusat data (*data center*).

Kelompok radikal

Anggota Komisi XIII DPR, Muslim Ayub, mengingatkan agar BNPT tak terlena dengan capaian nol serangan fisik terbuka dari teroris. Sebagai salah satu legislator dari Aceh, ia mengungkap daerahnya masih banyak kelompok radikal.

"Kita jangan berbangga dengan pencapaian itu. Terutama kami di Aceh itu masih banyak radikalisasi dan *ready*-kalisasi (penyiapan) di sana. Kalau nanti saya paparkan tidak akan habis-habis," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR itu pun mencontohkan kasus remaja yang hampir meledakkan dua tempat ibadah di Batu, Jawa Timur. Menurut dia, ancaman tersebut begitu berbahaya dan bisa menimbulkan dampak serius terhadap kondisi nasional.

"Baru-baru ini terjadi, pada Agustus 2024 kejadian ini di Batu, Jawa Timur. Seorang pemuda 19 tahun yang hampir meledakkan dua tempat ibadah di situ yang kekuatannya luar biasa pimpinan, ini yang perlu kita mawas," kata Muslim.

Anggaran terbatas

Meski demikian, Muslim Ayub dapat memahami bahwa anggaran BNPT yang hanya Rp 456,371 miliar kemungkinan tidak cukup untuk mencegah seluruh tindakan terorisme. Apalagi, anggaran sebesar itu sudah termasuk alokasi gaji pegawai.

Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, anggaran BNPT itu juga masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang sekitar Rp 1,5 triliun, Badan Narkotika Nasional (BNN) hampir Rp 1,5 triliun, dan Badan Intelijen Nasional (BIN) yang mencapai Rp 29 triliun.

Muslim Ayub merasa prihatin dengan anggaran yang dialokasikan untuk BNPT. Sebab, anggaran yang tersisa sangat terbatas untuk mendukung program-program sosialisasi antiradikalisme dan antiterorisme yang dicanangkan BNPT.

"Saya sedih kalau melihat anggarannya ini. Hanya Rp 400 miliar lebih. Padahal, tugasnya besar, harus sosialisasi di berapa kabupaten/kota, lalu berapa provinsi," tuturnya.

Oleh karena itu, ujar Muslim Ayub, Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Komisi XIII dapat mempertimbangkan kenaikan anggaran BNPT. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, BNPT diyakini dapat melengkapi segala fasilitas dan prasarana untuk menunjang tugas penanggulangan terorisme.

BNPT juga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penting pula bagi BNPT untuk memanfaatkan anggaran secara transparan.

(WIL)